



newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 114, Januari 2019



Lemhannas RI Gelar Konsolidasi Tenaga Kependidikan (hal. 10)

Harvard Kennedy School Kunjungi Lemhannas RI.....	2	Yayasan BPK Penabur Kunjungi Lemhannas RI.....	7
Lemhannas RI Peringati Hari Bela Negara.....	3	Gubernur Lemhannas RI Hadiri Pelantikan Pengurus IKAL Komisariat Provinsi.....	8
Peringatan Hari Ibu: <i>He for She</i> , Kemitraan Perempuan dan Laki-Laki.....	4	Lemhannas RI secara Tegas Tidak Terlibat dalam Politik Praktis...	9
Lemhannas RI adakan <i>Food Test</i>	5	Lemhannas RI Gelar Konsolidasi Tenaga Kependidikan.....	10
Kepala Biro Humas Paparkan Pengenalan Lembaga Kepada Peserta Negara Sahabat PPRA LIX.....	6	Sosialisasi PPRA Tahun 2020 kepada Athan Negara Sahabat.....	11

Harvard Kennedy School Kunjungi Lemhannas RI

Delegasi Harvard Kennedy School melakukan kunjungan ke Lemhannas RI untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang terjadi di Myanmar dan diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Rabu (12/12) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lantai I, Lemhannas RI.

Thomas J Vallely, menyampaikan mengenai operasi militer yang dilakukan oleh militer Myanmar yaitu pada Agustus 2017 yang lalu, militer Myanmar memaksa ribuan warga rohingya pindah dari Rakhine State ke Banglades. Hal tersebut dinilai sebagai suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh Myanmar.

Saat ini, Banglades berusaha untuk mengembalikan warga Rohingya ke Myanmar dengan cara yang aman dan bermartabat. Hal yang terjadi di Myanmar tersebut dinilai sebagai salah satu efek

dari transisi demokrasi. Vallely mengatakan bahwa negara di Asia bahkan dunia yang dinilai sebagai contoh yang sangat baik dalam penyelesaian masalah transisi demokrasi yang terjadi di Myanmar.

Indonesia, jelas Vallely, dinilai sukses dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari adanya transisi demokrasi. "Banyak negara yang gagal dalam menghadapi transisi demokrasi, Tapi Myanmar belum dapat dikatakan gagal," ujar Vallely. Vallely juga menyampaikan bahwa saat ini Harvard Kennedy School juga fokus terhadap penyelesaian masalah transisi demokrasi di situs negara yang rumit.

Selain itu, Vallely juga membicarakan mengenai hal yang terjadi di Maluku dulu dan Vallely menilai insiden tersebut memiliki kemiripan dengan Myanmar dan juga mengenai kebijakan PBB.





Lemhannas RI Peringati Hari Bela Negara

Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2018, Rabu (19/12) di Lapangan Tengah Lemhannas RI.

Sejak diterbitkannya Keppres Nomor 28 Tahun 2006, setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Pada tanggal tersebut terjadi sebuah peristiwa sejarah yang besar yaitu pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948.

“Upaya politik dan diplomasi Mr. Syafrudin Prawiranegara terbukti berhasil mengatasi kekuatan militer penjajah, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri tegak,” ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan seperti yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito yang menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara di Lemhannas.

Lebih lanjut dalam pidato Menkopolhukam yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas dinyatakan bahwa penetapan Hari Bela Negara merupakan penegasan bahwa bela negara sejak dulu telah memiliki konteks yang sangat luas. Bela Negara tidak dapat hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi.

“Segegap aparaturnegara, baik sipil maupun militer, yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok Tanah Air sesungguhnya sedang melakukan Bela Negara. Merekalah yang telah membuat Republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya,” kata Menkopolhukam.

Pada bulan September lalu, pemerintah telah menetapkan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 untuk menggenapi perwujudan amanat Bela Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang pertahanan negara.

“*Bela Negara tidak dapat hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi.*”

Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H.



“

Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama/pilar untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti.

*Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA*

Peringatan Hari Ibu: *He for She, Kemitraan Perempuan dan Laki-Laki*

Kampanye *He for She* masih menjadi landasan dalam peringatan Hari Ibu 22 Desember 2018, meskipun telah diluncurkan sejak tahun 2015 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

“Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa” adalah tema yang dipilih dalam peringatan Hari Ibu tahun ini, untuk menegaskan kembali bahwa perempuan dan laki-laki adalah mitra sekaligus insani yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. *He for She* sendiri adalah gerakan yang dicetuskan UN Women pada September 2014.

Bertempat di Lapangan Tengah, Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Ibu, Kamis (27/12). Dalam pidato Menteri PPPA yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dinyatakan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ketahanan

keluarga.

“Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama/pilar untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti. Ketahanan keluarga sekaligus menjadi pondasi dalam menerapkan kehidupan yang harmonis, damai, dan religius,” jelas Menteri PPPA.

“Pelibatan semua unsur masyarakat dan multi *stakeholder* sangat diperlukan, termasuk peran laki-laki dalam kampanye-kampanye/gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan, dan pencapaian kesetaraan gender”, imbuh Menteri PPPA.

Dalam momentum peringatan Hari Ibu ini, Menteri PPPA mengajak masyarakat, terutama generasi muda untuk mengingat tentang hakikat peringatan hari ibu sekaligus menjadi momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Lemhannas RI adakan *Food Test*

Pokja Pengadaan Pelaksanaan Dukungan dan Pelayanan Peserta Lemhannas RI mengadakan *Food Test* dalam rangka memilih perusahaan penyedia konsumsi untuk para peserta pendidikan di Lemhannas RI pada tahun 2019, diselenggarakan di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lt I, Lemhannas RI, Selasa (8/1).

Lemhannas RI melakukan *Food Test* guna mendapat standard mutu baik secara kualitas, kebersihan, dan estetika penyajian hidangan yang akan dinikmati oleh para peserta pendidikan sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan bagi kader pimpinan tingkat nasional.

Food Test tersebut diikuti oleh dua Perusahaan yaitu PT. Agustina Sakti dan PT. Lotus Veora Sejati. Dua perusahaan penyedia konsumsi tersebut telah melalui proses lelang yang diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 25 Desember 2018 melalui website LPSE Lemhannas RI.

Dalam *Food Test* tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo beserta Ibu Niniek Agus Widjojo dan wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito beserta Ibu Rina Bagus Puruhito turut serta mencicipi berbagai hidangan yang disediakan oleh kedua perusahaan penyedia jasa konsumsi.

Ir. Ita Endah Pertiwi, M.A. selaku Ketua Pokja mengatakan bahwa diantara sepuluh perusahaan yang mengikuti lelang, PT. Agustina Sakti dan PT. Lotus Veora Sejati adalah dua perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ke Lemhannas RI. Ita mengatakan di akhir *Food Test*, seluruh pejabat dan tamu undangan dapat memberikan penilaian terhadap kombinasi menu, cita rasa, dan peralatan serta saran dan juga masukan bagi kedua perusahaan jasa konsumsi tersebut.

Di akhir acara, PT. Agustina Sakti dinyatakan sebagai perusahaan penyedia jasa konsumsi yang dipilih oleh Lemhannas RI.



Kepala Biro Humas Paparkan Pengenalan Lembaga Kepada Peserta Negara Sahabat PPRA LIX



Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI, Brigjen TNI Mindarto memaparkan pengenalan lembaga kepada para peserta negara sahabat sebelum mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX, pada Senin (14/1) di Ruang Gatot Kaca Gedung Trigatra Lt. 3, Lemhannas RI, Jakarta

Pengenalan lembaga tersebut bertujuan agar para peserta yang berasal dari delapan negara yakni Srilanka, Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Singapura, Timor Leste, dan Australia, dapat lebih memahami sejarah, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Kerjasama Lemhannas RI, Laksma TNI Budi Setiawan, S.T.. Di hadapan para peserta, Budi Setiawan memberikan pengarahannya sekilas mengenai mekanisme pre-course peserta negara sahabat. Budi juga memberikan gambaran mengenai proses pendidikan yang akan dijalani oleh peserta selama tujuh bulan ke depan.

Selanjutnya, Mindarto menyampaikan materi mengenai sejarah berdirinya Lemhannas RI. "Lemhannas RI berdiri sejak tahun 1960 dilatarbelakangi oleh munculnya eskalasi politik akibat adanya ketidakpastian pertarungan ideologi liberal dan komunisme, baik di

dunia maupun Indonesia," kata Mindarto.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1994 berdasarkan Keppres Nomor 4/1999 tanggal 1 Februari 1994, Lembaga Pertahanan Nasional mengalami restrukturisasi dan menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap reposisi Lemhannas RI dari Mabes ABRI ke Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.

Selanjutnya pada tahun 2001, berdasarkan Kepres Nomor 16/2001 tanggal 23 Januari 2001, Lemhannas RI melakukan restrukturisasi organisasi. "Lemhannas RI melakukan restrukturisasi organisasi sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung ke Presiden RI. Selain itu, pertama kalinya Lemhannas RI dipimpin oleh pejabat sipil," ucap Mindarto.

Selain terkait dengan kesejarahan, Mindarto juga menjelaskan mengenai arti lambang, visi dan misi, struktur organisasi sesuai dengan Pergub No. 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, program kerja Lemhannas RI, persyaratan penerimaan peserta Program Pendidikan Reguler, Singkat dan Program Pemanjangan Pimpinan Daerah serta sarana Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

Yayasan BPK Penabur Kunjungi Lemhannas RI

Sejumlah 12 perwakilan dari Yayasan BPK Penabur yang dipimpin oleh Adri Lazuardi melakukan kunjungan ke Lemhannas RI dan diterima Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang didampingi Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito pada Senin (14/1) di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.

Dalam kunjungan tersebut, Adri Lazuardi mengatakan bahwa sebagai yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan, BPK Penabur juga berfokus kepada Pendidikan kebangsaan. Adri mengatakan bahwa Pendidikan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting diajarkan kepada para siswa yang berada di Pendidikan dasar dan menengah karena sekolah merupakan garda terdepan dalam mendiseminasikan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, Adri juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang berfokus ke pembangunan manusia yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Maka dari itu, BPK Penabur meminta arahan atau masukan dari Gubernur Lemhannas RI terkait dengan pendidikan nilai-nilai kebangsaan di sekolah serta pembangunan manusia sejak usia sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo kemudian menjelaskan bahwa Lemhannas RI memiliki tiga fungsi yaitu yaitu mendidik calon pimpinan tingkat nasional, melaksanakan pengkajian strategik yang sesuai dengan *core* Lemhannas RI, serta melaksanakan pemantapan

nilai-nilai kebangsaan. Lanjut Agus Widjojo, menyarankan para guru di BPK Penabur untuk mengikuti Program Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan Training of Trainers untuk para staf pengajar

Selanjutnya, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Guntur Irianto Ciptolelono, S.E. menjelaskan mengenai program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Guntur Irianto mengatakan bahwa program tersebut diadakan selama tujuh hari dengan menggunakan metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, dan diskusi antar kelompok. Selain itu, di akhir program para peserta diharuskan mengikuti *outbound*.

Sementara, Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Kewaspadaan Nasional, Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra wingarta, juga mengusulkan agar BPK Penabur mempersiapkan perwakilan pengajar untuk mengikuti pendidikan reguler di Lemhannas RI. Selain itu, I Putu Sastra juga mengusulkan agar jika nantinya mengikuti Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, BPK Penabur dapat memilih tema yang berfokus pada pengembangan manusia.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Karsiyanto, Direktur Pengkajian Politik Lemhannas RI Drs. Berlian Helmy, M.Ec., serta beberapa Tenaga Ahli dan Profesional Lemhannas RI.



Gubernur Lemhannas RI Hadiri Pelantikan Pengurus IKAL Komisariat Provinsi



“IKAL yang menjadi bagian dari Lemhannas RI, harus mampu mengkonsolidasikan seluruh anggota IKAL sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan berkiprah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan berbagai kegiatan

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*

Katan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas RI melakukan pelantikan pengurus IKAL Komisariat Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Lampung pada Rabu, (16/1) di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyatakan dalam sambutannya, bahwa menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi pada 17 April mendatang, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa dan wajar. Pengurus IKAL diharapkan dapat menyebarkan semangat kedewasaan demokrasi dengan menghormati aturan, norma, dan itikad dalam berdemokrasi.

Agum Gumelar menyatakan situasi yang terjadi selama Pemilu 2019 harus dapat disikapi secara bijak dan dewasa. “Sebagai pemikir intelektual di IKAL, saya berharap seluruh anggota IKAL mengerti dan memahami kehidupan demokrasi, bahwa perbedaan itu adalah soal biasa dan wajar. Perbedaan itu sementara, karena setelah pilkada atau pilpres selesai, kita harus normal kembali sebagai bangsa Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo yang hadir sebagai undangan dalam acara tersebut menyebutkan bahwa para pengurus IKAL untuk dapat turut menciptakan suasana yang kondusif sekaligus dapat menyukseskan pesta demokrasi pada tahun 2019 ini. Agus menyatakan IKAL yang menjadi bagian dari Lemhannas RI, harus mampu mengkonsolidasikan seluruh anggota IKAL sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan berkiprah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan berbagai kegiatan.

“Komisariat-komisariat yang telah terbentuk di beberapa wilayah, pada dasarnya akan menambah instrumen ikal pusat dalam mendorong dan meningkatkan kapasitasnya secara nasional. Saya berharap, keberadaan IKAL Komisariat yang terbentuk pada hari ini, juga mampu berperan menjadi katalisator dalam penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di wilayahnya masing-masing,” lanjut Agus.

Selain pelantikan pengurus, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus rapat koordinasi (rakor) pengurus IKAL Pusat dengan Komisariat IKAL Provinsi seluruh Indonesia. Rakor ini diselenggarakan berdasarkan amanat AD/ART untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja IKAL selama tahun 2017-2018 dan juga mengevaluasi visi dan misi IKAL.

Pada kegiatan ini, hadir pimpinan Lemhannas RI lainnya yaitu Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen TNI Pol Mochamad Iriawan. Sementara itu, hadir pula Wakil Ketua I IKAL Komjen Pol (Purn) Togar Sianipar dan Wakil Ketua Umum I IKAL Dr. Mustafa Abubakar.

Lemhannas RI secara Tegas Tidak Terlibat dalam Politik Praktis



Lemhannas RI melaksanakan Upacara Bendera yang rutin diselenggarakan setiap bulan di Lapangan Tengah Lemhannas RI, Kamis (17/1). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito.

Di awal amanat Gubernur yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, disampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun baru kepada seluruh peserta upacara dan berharap tahun 2019 dapat memberikan inspirasi dan semangat baru serta menjadi momentum untuk trus berkarya dan berkinerja dengan lebih baik.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif, disampaikan bahwa saat ini, tahapan pemilu telah memasuki tahap kampanye calon anggota DPR pusat, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Meski kontestasi dan suhu politik semakin meningkat, kata Bagus Puruhito yang membacakan amanat Gubernur, seluruh anggota Lemhannas RI sebagai abdi negara harus menjaga netralitas dari salah satu kandidat dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Dalam amanat tersebut disampaikan pula bahwa Lemhannas RI secara tegas tidak terlibat dalam politik praktis yang mendukung salah satu kandidat tertentu.

“Kita juga harus mampu bersikap bijak dan cerdas serta antisipatif terhadap potensi-potensi konflik sosial yang berkembang di masyarakat,” himbau Gubernur Lemhannas RI dalam amanatnya

“*Sebagai abdi negara, harus menjaga netralitas dari salah satu kandidat dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Lemhannas RI secara tegas tidak terlibat dalam politik praktis yang mendukung salah satu kandidat tertentu.*”

**Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo**

yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI.

Selain itu, disampaikan pula beberapa hal terkait kelembagaan seperti capaian realisasi anggaran Lemhannas RI tahun 2018 yang meningkat bila dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2017. Terkait dengan program kerja tahun 2019, Agus Widjojo melalui amanatnya yang juga menghimbau kepada seluruh unit kerja di Lemhannas RI untuk mampu mengoptimalkan seluruh fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga pengawasan secara cermat dan tepat.

Lebih lanjut, Agus Widjojo mengatakan dalam amanatnya, bahwa berdasarkan struktur organisasi Lemhannas RI yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 harus sudah sepenuhnya dapat diterapkan di seluruh unit kerja. Sebelum menutup amanatnya, Agus Widjojo mengingatkan pula mengenai persiapan pemeriksaan BPK RI dan juga Program Pendidikan Reguler Angkatan LIX yang dibuka pada 22 Januari 2019.



Lemhannas RI Gelar Konsolidasi Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program pendidikan di tahun 2019, Lemhannas RI mengadakan Konsolidasi Tenaga Kependidikan di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lt. 3, Lemhannas RI. Konsolidasi yang digelar selama dua hari tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Dalam laporan Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI (Purn) Karsiyanto kepada Gubernur Lemhannas RI, disampaikan bahwa tujuan konsolidasi tersebut untuk mensosialisasikan juknis (petunjuk teknis) Kedeputian Pendidikan dan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan PPRA LIX, PPSA XXII, dan P3DA X yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

Karsiyanto juga melaporkan bahwa konsolidasi yang diikuti oleh 120 tenaga kependidikan Lemhannas RI tersebut akan membahas mengenai evaluasi operasional pendidikan 2018, mekanisme pendidikan dan kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2019, revisi juknis penulisan KKA, KKK, dan Taskap, revisi juknis kerangka acuan dan revisi juknis penilaian peserta.

Sementara itu, Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah awal agar program pendidikan dapat mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan. Kegiatan ini dinilai memiliki arti penting dan strategis dalam proses menyiapkan dan memantapkan kader pimpinan tingkat nasional tahun 2019 ini.

Agus Widjojo juga mengatakan bahwa agar program pendidikan 2019 yaitu PPRA LIX, PPSA XXII, dan P3DA X dapat terselenggara dengan optimal, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang intens

dari seluruh unsur pendukung untuk mempersiapkan 10 komponen pendidikan yaitu kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga pendukung, alins alongins, bahan ajaran, evaluasi anggaran, sarana prasarana, sistem, dan metodenya.

Dengan tercapainya persepsi yang sama dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan diantara para peserta konsolidasi, dan merevisi juknis penyelenggaraan PPRA, PPSA, dan P3DA, Agus Widjojo mengharapkan program pendidikan dapat berlangsung lebih terarah dan memenuhi semua sasaran.

Sementara itu, Karsiyanto dalam paparannya mengenai evaluasi program pendidikan 2018 mengatakan terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi di dalam pelaksanaan program pendidikan di tahun 2019. Beberapa aspek yang harus dibenahi berdasarkan masukan dari para peserta pendidikan, yaitu aspek materi pendidikan, aspek operasional pendidikan dan aspek pembina materi/ tenaga pengajar/ tenaga pengkaji/ tenaga profesional/ tutor/ narasumber.

Selain itu, Karsiyanto juga menjelaskan mengenai persiapan sepuluh komponen pendidikan penting pendidikan. Karsiyanto menyatakan bahwa tenaga pengajar, evaluasi anggaran, alins alongins, sarana prasarana sudah disiapkan. Sementara beberapa komponen lain sedang dalam proses. Tema Seminar untuk para Peserta PPRA LIX juga telah ditentukan.

Konsolidasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai revisi kerangka acuan, revisi juknis penulisan KKA, KKK, dan Taskap, revisi juknis kerangka acuan dan revisi juknis penilaian peserta.

Sosialisasi PPRA Tahun 2020 kepada Athan Negara Sahabat

Lemhannas RI mengadakan sosialisasi program pendidikan reguler angkatan (PPRA) LX dan LXI tahun 2020 kepada atase pertahanan negara sahabat di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra, Lt.3, Lemhannas RI, Jumat (18/1). Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan S.T..

Dalam sesi paparan, Kepala Divisi Kerja Sama Internasional Kolonel Rujito G.Asmoro memaparkan mengenai visi dan misi Lemhannas RI. Rujito menjelaskan bahwa visi Lemhannas adalah untuk menjadi Lembaga yang berkualitas, kredibel dan berkelas dunia di bidang ketahanan nasional. Sedangkan misi Lemhannas adalah menyelenggarakan pendidikan untuk kader pimpinan tingkat nasional, melakukan pengkajian strategik untuk masukan kepada pemerintah, dan menyelenggarakan program pematapan nilai-nilai kebangsaan.

Rujito kemudian menjelaskan bahwa PPRA diselenggarakan selama tujuh bulan dan dibagi menjadi dua sistem yaitu *off campus* dan *on campus*. *Off campus* dilaksanakan selama 1,5 bulan. Selama *off campus*, para peserta mancanegara melakukan proses belajar dengan *teleconference*, dan *chatting* secara *live* dengan para pengajar dan peserta pendidikan lain. Sementara itu, sistem *on campus* dilakukan selama lima bulan di Lemhannas RI dengan metode ceramah dan diskusi.

Selama menjalani pendidikan, para peserta mancanegara juga akan mengikuti program inti dalam pendidikan yaitu Studi Strategis

Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Penulisan Kertas Karya Perseorangan (Taskap), Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas), dan Penyelenggaraan Seminar Nasional.

Untuk menjadi peserta pendidikan di Lemhannas RI, Rujito menjelaskan bahwa peserta harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu merupakan anggota aktif TNI, Polri, atau Aparatur Sipil Negara, berpangkat Kolonel, Kolonel Senior, Brigadir Jenderal atau berpangkat setara untuk Aparatur Sipil Negara, berusia maksimal 53 tahun, direkomendasikan oleh institusi asal, telah mengikut Sekolah Komando dan pendidikan setara bagi Aparatur Sipil Negara, dan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan pemeriksaan lengkap di rumah sakit pemerintah atau militer.

Selain persyaratan umum, para calon peserta dari negara sahabat juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti paspor diplomatik, visa, izin keamanan yang dikeluarkan oleh Atase Pertahanan Indonesia yang berada di Kedutaan Besar Indonesia di negara asal calon peserta, serta visa Indonesia 20-1A.

Kolonel Rujito juga menjelaskan mengenai jadwal detail yang harus di hadiri oleh calon peserta sebelum memulai pendidikan. Jadwal tersebut meliputi registrasi dan pengumpulan dokumen yang telah di perlukan serta kursus singkat Bahasa Indonesia serta material inti pendidikan di Lemhannas RI. Sebelum menutup paparannya, Rujito membuka sesi tanya jawab dengan calon peserta dan diakhiri dengan foto bersama.





Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **Mochamad Iriawan** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Mindarto**

Redaktur Pelaksana: **Eddy Tardjono** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Endah Heliana, Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Dwi Jayanto** Fotografer: **Suryadi, Suyono** Sekretariat: **Suparmo, Gatot, Ayu Novitasari**

Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI**, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>